

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hadikusuma, Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cet. 1
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- Saleh, K. Wantjik. 1997. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hartanto, J. Andy. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Surabaya: LaksBang Justitia.
- Dwi Putro, Widodo, Ahmad Zuhairi, Syukron Salam dan Elizabeth Lestari Taruli Lubis. 2016. *Penjelasan Hukum : Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, Jakarta: LeIP.

B. Jurnal

Fajar Adhitya Nugroho. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Secara Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kota Malang)*, ejournal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Prancisca Romana Dwi Hastuti. *Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait Di Pengadilan Negeri Di Surakarta)*. Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II, Nomor 2 Juli - Desember 2015. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Karolus K. Medan. *Jual-Beli Tanah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari UUPA*. Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 17, Nomor 3, 1987. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019.

Felly Yanti Sheilli Lumempouw, *Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Nur Hayati, *Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum*

Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional).

Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Ermasyanti, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses*

Jual Beli Tanah, Jurnal Universitas Bandar Lampung, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012. Diakses pada tanggal 1 April 2020.

Ramli Usman, Ilyas Ismail, Azhari, *Kekuatan Pembuktian Sertifikat*

Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2016. Diakses pada tanggal 1 April 2020.

Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri, *Implementasi Surat*

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018. Diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah